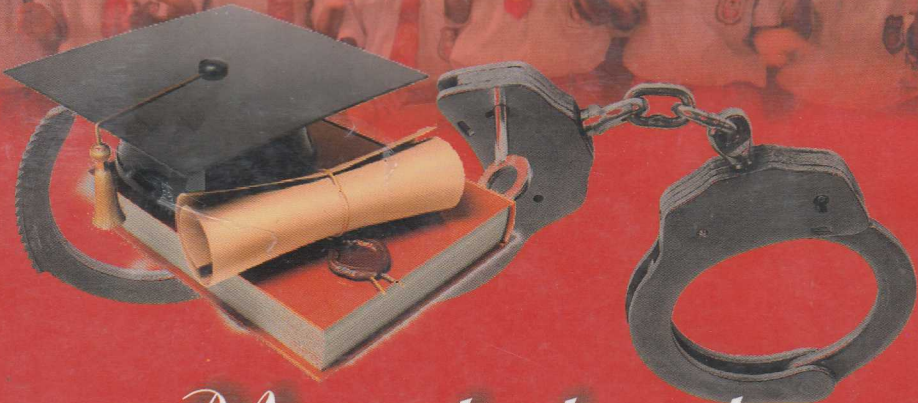
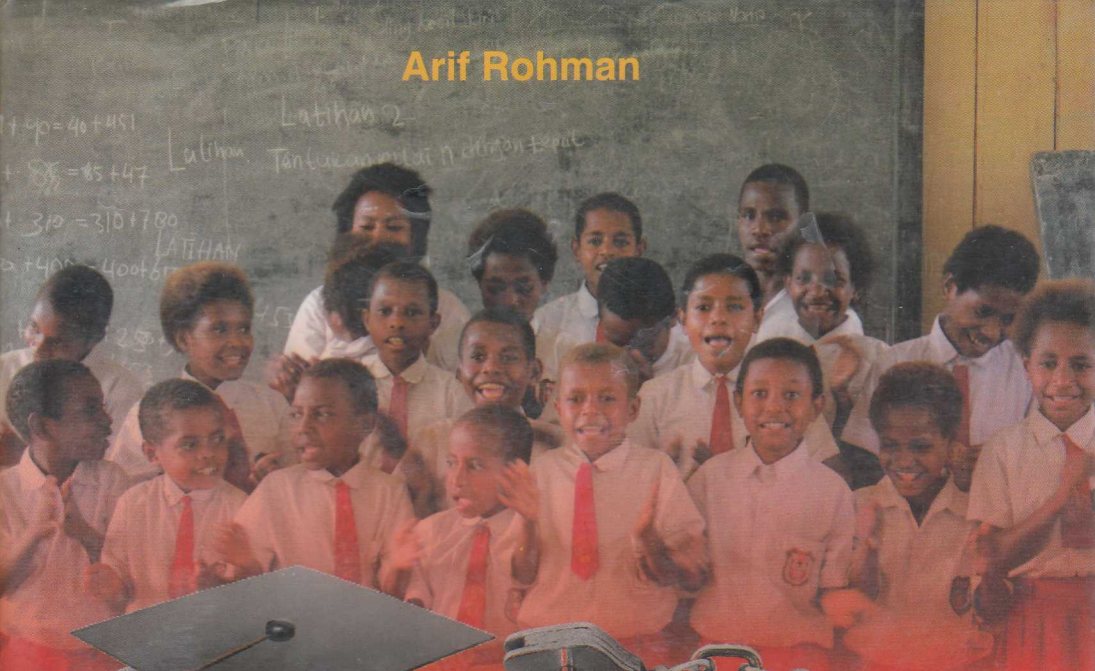


Arif Rohman



# *Membebaskan* **PENDIDIKAN**

Refleksi Menuju Penyelenggaraan  
Demokrasi Pendidikan di Indonesia

**Membebaskan Pendidikan:  
Refleksi Menuju Penyelenggaraan  
Demokrasi Pendidikan di Indonesia**

x + 252 Halaman, 14.5 x 21 cm

ISBN 10: 602-7762-44-6

ISBN 13: 978-602-7762-44-2

Desain Cover & Penata Isi  
Cak Mad

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya  
dalam bentuk apapun juga, baik secara mekanis maupun  
elektronis, termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain tanpa  
izin dari penerbit

Penerbit:

Aswaja Pressindo

Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani, Ngaglik,

Sleman, Yogyakarta

Telp.: (0274) 4462377

e-mail: [aswajapressindo@gmail.com](mailto:aswajapressindo@gmail.com)

Website: [www.aswajapressindo.co.id](http://www.aswajapressindo.co.id)

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I</b>	
<b>DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN</b>	
<b>SEBUAH REFLEKSI AWAL</b> .....	1
A. Pengertian Demokrasi .....	1
B. Aneka Persoalan dan Isu	
Demokrasi dalam Pendidikan .....	7
C. Refleksi Awal terhadap Dinamika	
Demokratisasi Pendidikan .....	13
D. Ringkasan .....	18
<b>BAB II</b>	
<b>SEJARAH PEMIKIRAN DEMOKRASI</b> .....	21
A Asal Usul Demokrasi .....	21
B. Tokoh-Tokoh Pemikir Demokrasi .....	27
C. Sejarah Perkembangan Demokrasi	
Indonesia dan Global.....	33
D. Variasi Pemikiran Demokrasi.....	45
E Ringkasan .....	56

**BAB III**

**PROSES, KARAKTERISTIK,  
DAN MACAM DEMOKRASI ..... 59**

- A. Proses Demokrasi ..... 59
- B. Karakteristik Masyarakat Demokrasi ..... 62
- C. Manfaat Positif Penerapan Demokrasi ..... 71
- D. Dua macam Demokrasi: Klasik dan Modern ..... 76
- E. Ringkasan ..... 80

**BAB IV**

**IDEOLOGI DEMOKRASI PENDIDIKAN ..... 85**

- A. Pengertian dan Sejarah Munculnya Ideologi ..... 85
- B. Ideologi-Ideologi Besar Dunia ..... 89
- C. Ideologi Pendidikan ..... 100
- D. Ideologi Demokrasi Pendidikan ..... 121
- E. Ringkasan ..... 126

**BAB V**

**MELANGKAH MENUJU  
DEMOKRASI PENDIDIKAN ..... 131**

- A. Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi  
dalam Pendidikan ..... 131
- B. Menuju ke Arah Demokrasi Pendidikan ..... 135
- C. Penguatan Relasi Demokrasi dan Pendidikan ..... 138
- D. Pendidikan Transisi Demokrasi ..... 143
- E. Ringkasan ..... 146

**BAB VI****PEMANTAPAN DEMOKRASI  
MENUJU DESENTRALISASI DAN  
OTONOMI PENDIDIKAN .....**

- |   |     |
|---|-----|
|   | 151 |
| A. Urgensi Demokratisasi dan<br>Desentralisasi pendidikan .....     | 151 |
| B. Variasi Model Desentralisasi dan<br>Otonomi Pendidikan .....     | 153 |
| C. Pemantapan Demokrasi dan<br>Otonomi Pendidikan .....             | 158 |
| D. Implikasi Pada Kebijakan<br>Pendidikan Kritis Partisipatif ..... | 164 |
| E. Ringkasan .....  | 171 |

**BAB VII****STRATEGI MENGHADAPI KOMODIFIKASI  
DAN LIBERALISASI PENDIDIKAN .....**

- |  |     |
|--|-----|
|  | 175 |
| A. Tantangan Komodifikasi dan Liberalisasi<br>Perdagangan dan Jasa .....           | 175 |
| B. Pengaruh Globalisasi dan Liberalisasi<br>Perdagangan terhadap Pendidikan .....  | 180 |
| C. Strategi Kebijakan Menghadapi Komodifikasi dan<br>Liberalisasi Pendidikan ..... | 185 |
| D. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Pendidikan .....                                | 188 |
| E. Ringkasan .....   | 191 |

**BAB VIII**

**MELURUSKAN KEBIJAKAN MENUJU**

<b>MUTU PENDIDIKAN .....</b>	<b>195</b>
A. Orientasi Kebijakan Mutu Pendidikan .....	195
B. Mewaspadai Globalisasi sebagai Doktrin Neo-Liberal .....	203
C. Neo-Liberalisme Mencengkeram Mutu Pendidikan Indonesia .....	207
D. Menguatnya Kapitalisasi Pendidikan Indonesia .....	218
E. Ringkasan .....	222

**BAB IX**

**DINAMIKA KEBIJAKAN**

**PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

<b>UNTUK PENINGKATAN MUTU .....</b>	<b>227</b>
A. Pembiayaan Pendidikan untuk Peningkatan Mutu .....	227
B. Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan .....	229
C. Distribusi Dana Sekolah dari Pemerintah .....	230
D. Desentralisasi Pembiayaan Pendidikan dan Ketimpangan Distribusinya .....	232
E. Penggalan Sumber Pembiayaan Sekolah dari Masyarakat .....	235
F. Ringkasan .....	237

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>241</b>
-----------------------------	------------

# BAB I

## DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN

### SEBUAH REFLEKSI AWAL

#### A. Pengertian Demokrasi

Awal abad ke-21 dewasa ini, banyak terjadi proses transformasi politik masyarakat di banyak kawasan dunia. Masing-masing kawasan dunia mengalami suatu proses usaha menuju terwujudnya sistem kehidupan politik tertentu. Yaitu usaha mereka dalam mewujudkan sistem kehidupan politik yang lebih baik. Salah satu sistem kehidupan politik masyarakat yang dianggap lebih baik adalah sistem "*kedaulatan rakyat*", bukan "*kedaulatan tuan*". Sistem ini diyakini dapat memberikan dasar-dasar penyelenggaraan kehidupan yang lebih adil dan humanis bagi setiap orang. Sistem ini menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Sistem ini menghargai hakikat dan martabat rakyat yang harus dilindungi hak-hak asasinya demi kepentingan bersama.

Sistem kehidupan politik di atas, identik dengan gagasan awal konsep *societies civile* yang dikemukakan oleh JJ. Rousseau (Muhammad AS Hikam, 1996). Menurut JJ. Rousseau, konsep tersebut menunjuk pada suatu sistem negara yang salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan para anggotanya. Sistem negara yang menjamin hak-hak dan kebebasan sipil tersebut kemudian didorong menuju pada cita-citanya dalam mewujudkan kebaikan bersama (*public good*), (Dede Mariana dan Caroline Paskarina, 2008).

Secara historis, salah satu tokoh pemikir yang mula-mula mengkaji sistem politik adalah Socrates (470-399 SM). Pemikiran

dia lebih menekankan konsep moral dalam sistem politik. Kebaikan bersama (*common good*) atau keadilan bersama (*common equity*) menurut Socrates harus menjadi tujuan politik. Sistem politik yang adil adalah sistem yang di dalamnya setiap kelompok melaksanakan tugas masing-masing dan mau bekerjasama secara maksimal.

Plato (427-347 SM) mengembangkan lebih jauh pemikiran Socrates. Plato mengidealkan negara sebagai sistem politik yang dapat menjamin kebutuhan dan keinginan individu-individu yang berbeda. Negara menurut Plato, harus dapat membangun kerjasama antar individu sehingga dapat saling bahu membahu dan mengemban tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing, demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Plato menuangkan pemikirannya ke dalam beberapa buku yang telah dia tulis, seperti: *Politeia* (negara), *Politikus* (abdi negara), dan *Normoi* (undang-undang)..

Dibanding dua tokoh di atas, Epicurus (341–270 SM) memiliki pendapat berbeda. Dia menekankan bahwa negara bukanlah bagian penting dalam kehidupan manusia, tetapi justru manusia lah yang menempati posisi sentral sebagai warga negara. Negara adalah hasil upaya manusia sebagai individu dalam rangka memenuhi kebutuhan individualnya. Thomas Hobbes (1588-1679M) memandang bahwa manusia pada dasarnya adalah egois dan menyukai konflik demi memperebutkan kekayaan, kemuliaan, dan reputasi. Manusia juga memiliki rasionalitas, namun rasionalitas tersebut banyak dipakai sebagai alat konflik dengan cara bersilang pendapat tentang apa yang baik (Ramlan Surbakti, 1992). Sedangkan John Locke (1632-1704 M) melihat setiap manusia hakekatnya adalah bebas dan berkedudukan sederajat satu sama lain (*perfectly free and equals*). Oleh karenanya, tidak boleh ada seorang yang bermaksud mengganggu kehidupan dan kebebasan orang lain.

Aneka pemikiran para ahli dari Socrates sampai John Locke di atas merupakan ikhtiar para ahli dalam mencari formula sistem politik yang ideal di masyarakat. Pemikiran sistem politik yang



ideal tidaklah berpusat pada kedaulatan tuhan (*theocracy*), kedaulatan raja (*emprocracy*), atau kedaulatan bangsawan/priyayi (*aristocracy*), bahkan kedaulatan pengusaha (*oligarchy*), akan tetapi dewasa ini sebagian besar memilih sistem *kedaulatan rakyat* (*democracy*). Sistem politik demokrasi diyakini sebagai sistem yang responsif kepada aspirasi masyarakat umum. Sistem ini memberikan kebebasan berpendapat bagi warga dalam memperoleh ruang publik termasuk dalam menyuarkan aspirasinya. Dengan sistem demokrasi, kekuasaan absolut (*absoluth power*) melalui bentuk-bentuk tirani, kediktatoran, dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Oleh karenanya, sistem politik demokrasi ini diyakini sebagai sistem yang lebih humanis menuju pada penataan kehidupan masyarakat yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan. Dengan kata lain demokrasi diyakini dapat dijadikan sebagai instrumen penting menuju cita-cita ideal membangun masyarakat sejahtera (*welfare state*). Pertanyaannya adalah apakah yang disebut demokrasi itu?

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang dipraktikkan di Athena pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 M, bersamaan dengan berkembangnya sistem demokrasi di banyak negara.

Sistem demokrasi yang diaplikasikan di Yunani Kuno, awalnya merupakan jenis demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah suatu bentuk pemilihan pemerintahan yang dilakukan secara langsung oleh seluruh warga. Kondisi ini dapat berjalan karena praktek demokrasi berada dalam suasana yang sederhana, dengan luas wilayah negara yang terbatas, dan jumlah penduduk relatif sedikit. Pada era modern sekarang ini, pelaksanaan demokrasi tidak lagi bersifat langsung namun bersifat perwakilan. Hal ini karena era sekarang wilayah negara tidak seperti bentuk negara kota pada

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. 2009. *Ideologi Politik*. (<http://www.kammi.or.id/last/lihat.php?materi&do=view&id=168>, download 12 Januari 2009).
- Abrahamsem. 2004. *Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: Lafadl.
- Ace Suryadi dan H.A.R.Tilaar. 2003. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Achmad Dardiri. 2005. *Benarkah Pendidikan Nasional Berperan dalam Membentuk Watak dan Membangun Bangsa*. Artikel majalah ilmiah Fondasia FIP UNY Edisi 8/Th IV, September 2005.
- Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance: Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Aim Abdulkarim. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama.
- Alisjahbana, A.S. 2000. *Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan*. *Jurnal Analisis Sosial*, AKATIGA,1,29-38.
- Amich Alhumani. 2000. *Pembangunan Pendidikan Dalam Konteks Desentralisasi*. Artikel Kompas 11 September 2000. Jakarta.
- Anonim. 2009. *Kesepakatan Umum Perdagangan Sektor Jasa (GATS)*. [www.globaljust.org.igi@globaljust.org](http://www.globaljust.org.igi@globaljust.org). download 14 Agustus 2009.

- Anonim. 2011. *Demokrasi*. <http://ekonomiucy.blogspot.com>.  
Download 3 Desember 2011.
- Anonim. 2012a. *Demokrasi*. <http://www.scribd.com>, download 3 Agustus 2012.
- Anonim. 2012b. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Dunia. <http://ispdewy.wordpress.com/2010/11/10/sejarah-perkembangan-demokrasi-di-dunia/> download 7 Agustus 2012.
- Arcaro, Jerome S. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata langkah Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif Rohman. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Arif Rohman dan Teguh Wiyono. 2011. *Educational Policy in Decentralization Era*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aryanto Abidin. 2009. *Ideologi Politik*. (<http://www.kammi.or.id/last/lihat.php?d=materi&do=view&id=168>, download 12 Januari 2009).
- Ayu N. Andini. 2007. *Isu-isu Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Bayu Wahyono. (2011). *Mengkaji fenomena pendidikan persekolahan dari perspektif Sosiologi Kritis*. (sumber: [eprints.uny.ac.id/.../Mengkaji\\_Fenomena\\_Pendidikan\\_Persekolahan\\_dari.pdf](http://eprints.uny.ac.id/.../Mengkaji_Fenomena_Pendidikan_Persekolahan_dari.pdf))
- Burki, Shahid J.; Perry, Guillermo E.; dan Dillinger, William E. 1999. *Beyond the Center: Decentralizing the State*. Washington DC: World Bank.
- Burnett, N. et. all. 1995. *Setting Investment Priorities in Education*. Dalam Fasil Jalal dan Dedi Supriyadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Kerjasama Bappenas Jakarta dan Adicita Yogyakarta.

- Cheppy Haricahyono. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Cholisin. 2006. *Kebijakan Pendidikan dan Pendidikan Demokrasi*. Artikel Jurnal EKOFEUM Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Edisi 03 Feburari 2006.
- Chomsky, Noam (1999), *Profit Over People, Neoliberalism and Global Order*, New York: Seven Stories Press.
- Collier, P. 1998. *The Political Economy of Ethnicity*. Annual World bank Conference on Development Economics. 20021 April 1998.
- Collins, Randall. 1979. *The Credentials Society: An Historical Sociology of Education and Stratification*. New York: Academic Press.,
- Dahl, Robert A. 2001. *Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Davies, Lynn. 1999. *Participation, power-sharing, and school improvement*. Nottingham: Educational Herities Press.
- Davies, Lynn. 2008. *Interruptive Democracy in Education*. dalam Zajda, Davies, and Majhanovich (eds). 2008. *Comparative And Global Pedagogies*. Melbourne: Springer.
- Dede Mariana dan Caroline Paskarina. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- De Groof, Jan, Gracienne Lauvers, dan Germain Dondelinger. 2003. *Globalization and Comptetion in Education*. Nijmegen, The Netherlands. Wolf Legal Publishers.
- Depdiknas. 2001. *Desentralisasi Pendidikan*. Jakarta: Komisi Nasional Pendidikan.
- Depdiknas. 2005. *Rencana Strategis 2005-2009*. Jakarta. Depdiknas, 2005.



**Arif Rohman** Lahir di Demak 29 Maret 1967 E-mail: arv2009@yahoo.co.id. Latar belakang pendidikannya adalah lulus sarjana Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (1986-1992), Magister ilmu-ilmu sosial Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya (1997-2001), Program Doktor S3 Ilmu Pendidikan Pascasarjana UNY (2009-2012). Sehari-hari mengajar di program studi Kebijakan Pendidikan

FIP UNY mengampu mata kuliah: Analisis Kebutuhan dan Perencanaan kebijakan Pendidikan, Analisis Biaya Pendidikan, Demokrasi dan Pendidikan. Selain itu mengajar pula di beberapa program studi di lingkungan UNY mata kuliah Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Komparatif. Kegiatan lain adalah aktif dalam beberapa seminar sebagai pembicara dan peserta, aktif meneliti, dan kegiatan sosial keagamaan. Menjadi sekretaris Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan di Lembaga Penelitian UNY (2006-2011); Redaktur majalah ilmiah FIP UNY "Fondasi Pendidikan" (2000-2011); Pembina Majalah Mahasiswa UNY "Ekspresi" (2002-2006). Pernah juga selama empat tahun (2005-2008) dipercaya Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kemendikbud sebagai tim pengembang Klinik Pembelajaran dengan sasaran guru-guru SD di tujuh kota di Indonesia.

Buku yang sudah ditulis meliputi: **Kebijakan Pendidikan** (Aswaja Pressindo, 2012) **Education Policy in Decentralization Era** (Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010), **Pendidikan Komparatif: Menuju ke Arah Metode Perbandingan Pendidikan Antarneegara** (Laksbang Grafika Yogyakarta, 2010). **Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan** (Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2009); **Politik Ideologi Pendidikan** (Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2009). **Ilmu Pendidikan** (UNY Press Yogyakarta, 2008, 2009, 2010, 2011), **Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Booklet untuk Peserta Klinik Pembelajaran** (Direktorat Ketenagaan Ditjend Dikti Kemendikbud, 2007). **Pengetahuan Sosiologi untuk SLTP klas VII dan kelas VIII** (Saka Mitra Kompetensi Klaten, 2005 dan 2006); **Sosiologi SLTA kelas X, XI, dan XII** (Cempaka Putih Klaten, 2004); **Sosiologi SLTA kelas X, XI, XII** (Saka Mitra Kompetensi Klaten, 2005 dan 2006).



**Aswaja Pressindo**

Anggota IKAPI No. 071 / DIY / 2011

Jl. Plosokuning V No. 73, Minomartani, Sleman, Yogyakarta

Website : [www.aswajapressindo.co.id](http://www.aswajapressindo.co.id)

Telp. (0274) 4462377 Email: [aswajapressindo@gmail.com](mailto:aswajapressindo@gmail.com)

